



APSSAI Accounting Review (April 2023)

Pengaruh aspek keuangan dan non keuangan terhadap opini audit pada pemerintah kabupaten dan kota di Republik Indonesia.

Iswari, Y., Apandi R.N.N, Widarsono, A. (2022). *APSSAI Accounting Review*, 3(1), 1-28. <https://doi.org/10.26418/apssai.v3i1.45>.

Yuni Iswari

Universitas Pendidikan Indonesia,
Indonesia

R. Nelly Nur Apandi*

Universita Pendidikan Indonesia,
Indonesia

Agus Widarsono

Universitas Pendidikan Indonesia,
Indonesia

Received: 28 Desember 2022

Revision: 17 April 2023

Accepted: 20 April 2023

JEL Classification: H83, M42

DOI: 10.26418/apssai.v3i1.45

PENGARUH ASPEK KEUANGAN DAN NON KEUANGAN TERHADAP OPINI AUDIT PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI REPUBLIK INDONESIA

ABSTRACT *The purpose of this research was to examine the influence of financial aspects (local original income [PAD] and capital expenditure [BM]) as well as non-financial or human resource aspects (dynasty politics [PD], political background [LBPo], and educational background [LBPen]) on audit opinion [OA] on district and city government in Indonesia. The data were processed using a quantitative descriptive method followed by correlation analysis. Based on data processing, it was concluded that the political dynasty variable (PD) and political background (LBPo) had an effect on audit opinion, while the variables of local revenue (PAD), capital expenditure (BM), and educational background (LBPen) had no effect on audit opinion (OA). This research uses purposive sampling with the criteria that the regional government has a percentage of achievement of own-source revenue at intervals of 50%-150%, then for the percentage of achievement of capital expenditure at intervals of 50%-100%. Therefore, for further research, it is expected to use population data. The benefits of this research are expected to be a reference for further research.*

Keywords: *Audit opinion; Financial aspects; Non-financial aspects*

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh aspek keuangan (pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja modal (BM)) serta aspek non keuangan atau sumber daya manusia (politik dinasti (PD), latar belakang politik (LBPo), dan latar belakang pendidikan (LBPen)) terhadap opini audit (OA) pada pemerintahan daerah kabupaten dan kota di Indonesia. Data diolah dengan metode deskriptif kuantitatif yang dilanjutkan dengan analisis korelasi. Berdasarkan pengolahan data, diperoleh kesimpulan bahwa variabel politik dinasti (PD) dan latar belakang politik (LBPo) berpengaruh terhadap opini audit, sedangkan variabel pendapatan asli daerah (PAD), belanja modal (BM), dan latar belakang pendidikan (LBPen) tidak berpengaruh terhadap opini audit (OA). Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria Pemda memiliki persentase pencapaian atas pendapatan asli daerah dengan interval 50-150%, lalu untuk persentase pencapaian belanja modal dengan interval 50-100%. Maka dari itu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan data populasi. Diharapkan, kajian ini menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

Kata kunci: Aspek keuangan; Aspek non keuangan; Opini audit

*Corresponding author, email: nelly.nna@upi.edu

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia
Jalan Dr. Setiabudi No. 229, Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40154

Pendahuluan

Menurut UU Nomor 14 Tahun 2008 menyatakan bahwa "Pengungkapan informasi publik kepada masyarakat merupakan cara pemerintah untuk memaksimalkan segmen pengawasan

publik pada kegiatan operasional pemerintahan serta lembaga publik yang lainnya". Berdasarkan prinsip Pancasila yang berlandaskan pada azas demokrasi, pemerintahan yang selalu terbuka kepada rakyatnya yang dinilai memiliki legitimasi yang lebih dibandingkan dengan pemerintahan yang tertutup (Faturrohman, 2017). Berdasarkan fakta serta bukti empiris yang ada, menyebutkan bahwa pelayanan publik di Indonesia dinilai masih belum optimal di terapkan oleh pemerintah (Cahya & Wibawa, 2019). Selain itu, berdasarkan laporan Ombudsman Republik Indonesia menyebutkan bahwa, pemerintah daerah (Pemda) adalah lembaga yang menempati urutan pertama yang banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat atas pelayanan yang diberikannya (Rachmattie *et al.* 2008). Benny (2016) menyatakan bahwa kurangnya keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh pemerintah akan mengakibatkan rusaknya nama baik atau reputasi dari pemerintah itu sendiri. Maka dari itu, pada masa era reformasi sekarang ini, tuntutan atas keterbukaan informasi publik menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah.

Kurangnya transparansi publik ini, dapat menimbulkan sebuah risiko informasi keuangan yang tidak berkualitas dari Pemda. Faktor pertama, yang dapat menimbulkan risiko informasi keuangan yang tidak berkualitas adalah kurangnya kompetensi. Kompetensi yang minim diakibatkan dari rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki sumber daya manusia (SDM) di dalam organisasi (Tjiptoherijanto, 1997). Kompetensi atau kemampuan dari SDM yang dimiliki pemerintahan selalu berkaitan dengan pembicaraan mengenai tingkat kematangan dari aparatur pemerintah itu sendiri, tingkat kematangan dari kualitas SDM dapat diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan maupun dari pengalaman (Rasyid, 2000). Faktor kedua adalah konflik kepentingan, konflik kepentingan dapat menimbulkan perilaku oportunistik (*opportunistic behaviour*), hasil dari perilaku tersebut, memunculkan sebuah sikap yang hanya mementingkan diri serta kelompoknya (*self-interest*) tanpa mempertimbangkan apa yang menjadi tanggung jawab utama dari orang tersebut, perilaku oportunistik timbul karena sebuah pandangan bahwa seseorang tersebut memiliki keunggulan serta kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain di sekitarnya (*discretionary power*) yang mengakibatkan seseorang tersebut terus berfikir dan mencari berbagai celah untuk menemukan sebuah cara agar dapat memaksimalkan utilitas (Renas & Dul Muid, 2014). Timbulnya konflik kepentingan di kalangan para petinggi adalah suatu gambaran dari kesalahpahaman, kegamangan, serta egoisme (Mustajib & Aditya, 2022). Maka dari itu, kompetensi dan konflik kepentingan dapat menjadi faktor yang penting terhadap kualitas informasi keuangan pada pemerintahan daerah.

Karena adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik ini, menyebabkan diperlukannya suatu laporan keuangan dari pemerintah yang berkualitas. Salah satu proses untuk meminimalisir risiko informasi keuangan yang tidak berkualitas adalah dengan proses audit. Menurut Mardiasmo (2002), ada 3 komponen yang menjadi dasar untuk keberhasilan sebuah otonomi daerah, di antaranya yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Melalui proses audit diharapkan memberikan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi yang dilakukan Pemda (Mardiyati & Wahyudi, 2018). Berdasarkan UUD Tahun 1945 pasal 23 ayat 5 menjelaskan bahwa “BPK bertugas serta bertanggungjawab untuk mengaudit segala komponen mengenai pengelolaan serta pertanggungjawaban pemerintahan yang berkenaan dengan keuangan negara baik dalam pemerintahan pusat, pemerintahan daerah serta lembaga pemerintahan lainnya”. Proses audit oleh BPK dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme sehingga audit yang dilakukan oleh BPK menjadi sebuah proses pemeriksaan yang berkualitas (Sipayung & Wahyudi, 2022). Suatu penilaian atas kinerja Pemda, apakah Pemda tersebut sudah menjalankan pemerintahan dengan baik atau tidak dapat ditinjau melalui opini audit yang diperoleh (Marfiana & Kurniasih, 2013).

Hasil dari proses audit adalah sebuah opini. Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 menyebutkan bahwa, “Opini merupakan pernyataan profesional atas pemeriksaan mengenai kualitas laporan keuangan yang didasarkan pada kewajaran informasi keuangan yang disajikan”. Berdasarkan (Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017) mengenai SPKN menyebutkan bahwa terdapat 4 jenis opini diantaranya adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Untuk dapat meraih opini WTP, Pemda harus memenuhi 4 komponen dasar dalam pengelolaan keuangan yakni diantaranya: mengenai kesesuaian antara komponen laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan, hukum, serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan juga efektivitas sistem pengendalian intern yang diterapkan pada Pemda. Jika suatu pemerintahan daerah ingin mendapatkan opini WTP maka pemerintah haruslah memenuhi empat komponen dasar tersebut (Priyanto, 2009). Jika pada proses audit ternyata auditor menemukan suatu temuan kesalahan, tetapi tingkat kesalahan dari temuan tersebut dapat dimaklumi (*tolerable error*) maka auditor akan memberikan opini WDP kepada auditeenya (Fitria, 2015). Selanjutnya Fitria (2015) menjelaskan bahwa jika pada proses audit, auditor menemukan sebuah kesalahan yang dilakukan oleh *auditee* tetapi tingkat temuan

kesalahan tersebut melebihi tingkat kesalahan yang dapat dimaklumi (*tolerable error*) atau bahkan mengarah pada sifat kecurangan (*fraud*) maka auditor akan memberikan opini TW kepada *auditee*. Lalu selanjutnya untuk opini TMP diberikan ketika jika dalam proses audit, auditor mengalami hambatan dalam pengumpulan bukti audit, hal ini mengartikan bahwa laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan (Adhariani, 2014). Sehingga dalam arti luas auditor tidak memiliki cukup bukti untuk melakukan pemeriksaan audit dan pemberian opini, misalnya karena auditor tidak diperkenankan untuk meminta data-data untuk bukti audit, sehingga auditor tidak dapat memberikan penilaian atas laporan auditor apakah pemerintah daerah tersebut pantas di berikan opini WTP, WDP atau TW. Berikut adalah diagram tren opini BPK atas laporan keuangan Pemda tahun 2012-2017 se-Indonesia:



Gambar 1. Tren Opini Pemda di Indonesia

Sumber: Data Diolah (2022)

Dari data tersebut terlihat sampai dengan tahun 2017 masih ada pemerintah kabupaten (Pemkab) dan kota di Indonesia yang masih mendapatkan opini WDP dan TW. Hal ini mengartikan masih kurang mampunya pemerintah Pemda dalam menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas. Akan tetapi terdapat juga Pemda yang mendapatkan opini WTP artinya pemerintah tersebut mampu memberikan laporan keuangan yang berkualitas. Suatu laporan keuangan dikatakan berkualitas jika laporan keuangan dari pemerintah tersebut terbebas dari salah saji material (*matreality*). Salah saji material adalah ketidaksesuaian antara nominal, klasifikasi, penyajian atau pengungkapan dari suatu akun atau item laporan keuangan dengan yang seharusnya (Ubar & Khairul, 2019). Salah saji material dapat dibagi menjadi 2 jenis diantaranya yaitu: kekeliruan (*error*) dan kecurangan (*fraud*) (Ramadhan, 2019). Istilah kekeliruan (*Error*) merujuk kepada suatu kesalahan atas perhitungan, estimasi

akuntansi, intepretasi serta kesesuaian kepada standar akuntansi yang berlaku yang dapat disebabkan oleh kurangnya kompetensi atau ketidak sengajaan kesalahan yang dilakukan oleh SDM yang dimiliki organisasi (Mulyani & Suryawat, 2011). Berdasarkan PSA 316 No. 2 dan 3 menyebutkan bahwa kekeliruan (*error*) sutau keadaan bahwa terdapat kesalahan penyajian, jumlah serta pengungkapan informasi keuangan yang tidak disengaja. Sedangkan untuk istilah kecurangan (*fraud*) sebuah situasi dimana informasi keuangan yang disajikan secara salah dalam hal jumlah, penyajian serta pengungkapan tetapi didasarkan atas perilaku dan motif yang disengaja untuk mementingkan diri sendiri guna menyesatkan para pengguna atau pembaca laporan keuangan (Wells, 2007). Tujuan dilakukannya kecurangan (*fraud*) bersifat negative, yakni untuk mengambil keuntungan suatu individu tau pihak-pihak tertentu tetapi merugikan individu atau pihak yang lainnya, yang di sebabkan oleh adanya benturan kepentingan (*self interest*). Soleman (2013) menyatakan bahwa pemerintah diharapkan mampu mengatasi kecurangan (*fraud*) yang disebabkan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab serta memiliki benturan kepentingan didalam tubuh pemerintahan, mengingat banyak sekali dampak negatif yang disebabkan oleh kecurangan (*fraud*) tersebut. Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa, istilah kekeliruan (*error*) berkaitan dengan kompetensi atau keahlian yang dimiliki oleh SDM di pemerintahan daerah, sedangkan untuk istilah kecurangan (*fraud*) berhubungan dengan benturan kepentingan serta keegoisan dari SDM yang dimiliki Pemda.

Terdapat dua aspek penting dalam pemberian opini untuk laporan keuangan yang pertama adalah aspek keuangan dan yang kedua adalah aspek non keuangan. Aspek pertama adalah aspek keuangan, berdasarkan PPRI NOMOR 8 TAHUN 2006 menjelaskan sebagai cerminan bahwa pemerintah daerah telah melakukan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan, Pemda berkewajiban untuk menyajikan informasi keuangan yang akuntabel serta andal kepada masyarakat, sebagai bahan pertimbangan untuk menilai bagaimana efektifitas Pemda dalam menjalankan pemerintahannya. Temuan *research* yang dilakukan oleh Rudyawan & Badera (2009) yang menyatakan bahwa kondisi keuangan yang dimiliki pemerintah Pemda akan mempengaruhi opini audit yang diterima oleh Pemda tersebut. Opini audit yang di berikan BPK kepada Pemda memberikan gambaran mengenai kualitas Pemda dalam mengelola keuangannya, sehingga opini tersebut dapat menjadi tolak ukur bagi pemerintah pusat untuk menilai apakah Pemda dapat mencapai kinerja sesuai dengan target yang diinginkan atau tidak (Wulandari, 2015). Aspek kedua adalah aspek non keuangan, aspek non keuangan memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai bagaimana

kualitas SDM yang dimiliki oleh Pemda. Berdasarkan hasil *research* terdahulu yang dilakukan oleh Dewi (2015) menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh variabel SDM. Hal ini sejalan dengan *research* yang dilakukan Gumelar (2017). Lalu berdasarkan *research* yang dilakukan oleh Emilda (2014) menjelaskan bahwa SDM merupakan kunci atau ukuran keberhasilan suatu organisasi dan bahwa keterampilan, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki SDM sangat berharga bagi organisasi. Maka berdasarkan uraian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa suatu tata kelola pemerintahan yang baik di dukung oleh aspek keuangan serta aspek non keuangan (SDM) yang memadai.

Yang pertama aspek keuangan, terdapat banyak sekali akun dalam laporan keuangan Pemda yang dapat menjadi komponen dalam aspek keuangan. Dua diantaranya adalah akun pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja modal (BM). Komponen pertama dari aspek keuangan adalah pendapatan asli daerah, PAD merupakan sejumlah uang yang diperoleh Pemda yang bersumber dari ekonomi daerah itu sendiri, terdapat 4 akun dalam PAD yakni retribusi daerah, pajak daerah, hasil usaha milik daerah yang terpisah, dan PAD wajib lainnya. PAD merupakan sumber keuangan paling utama yang dimiliki Pemda yang sangat berperan penting untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut (Halim, 2001). Lalu Putri & Amanah (2020) menjelaskan bahwa, PAD memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai tingkat kemandirian yang dimiliki oleh suatu daerah. Suatu organisasi yang baik dapat dinilai melalui tingkat profitabilitas yang dimiliki oleh organisasi tersebut, semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dimiliki oleh suatu organisasi maka semakin tinggi pula peluang atau potensi organisasi tersebut untuk mendapatkan opini yang baik (Anjelina, 2012). Untuk mengukur suatu pemerintahan daerah apakah memiliki nilai profitabilitas yang baik atau tidak, salah satunya dengan menghitung rasio pencapaian PAD. Rasio pencapaian PAD dapat dihitung dengan membandingkan antara anggaran PAD dengan realisasi PAD yang dimiliki oleh Pemda (Hidayah & Ghazalah, 2020). Berdasarkan *research* yang telah dilakukan (Halim, 2012) menjelaskan bahwa untuk menilai tingkat kemandirian Pemda dalam melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemanfaatan PAD, kita bisa melakukan penilaian dengan menggunakan rasio pencapaian PAD dengan arti ketika tingkat rasio pencapaian PAD tinggi yang dimiliki oleh Pemda mencerminkan Pemda memiliki kemampuan yang baik untuk perencanaan dan penggunaan PAD tanpa adanya campur tangan atau bantuan dana dari pemerintahan pusat atau provinsi. Semakin rendah selisih antara anggaran PAD dengan realisasi PAD maka semakin tinggi tingkat efektifitas daerah tersebut, semakin tinggi tingkat efektivitas, opini yang didapatkan oleh Pemda maka akan semakin baik.

Komponen yang kedua dari aspek keuangan adalah belanja modal. Belanja modal (BM) adalah akun dalam laporan Pemda yang menggambarkan berapa sumber daya keuangan yang dikorbankan serta anggarannya oleh Pemda untuk mendapatkan aset tetap dan aset tetap lainnya yang memberikan masa manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Efektifitas pengelolaan keuangan pada Pemda dipengaruhi oleh variabel BM (Peni & Astawa, 2021) dan hal ini sejalan dengan hasil yang dilakukan oleh Pratiwi (2018). Semakin tinggi dana yang dialokasikan untuk BM maka semakin tinggi pula nilai aset yang dimiliki oleh Pemda, nilai aset yang tinggi mencerminkan bahwa Pemda tersebut memiliki infrastruktur dan sarana yang baik untuk menunjang aktivitas masyarakatnya, apabila semakin banyak infrastruktur serta sarana yang dibangun oleh Pemda maka akan meningkatkan nilai efektifitas kinerja dari pengelolaan keuangan di pemerintahan daerah tersebut (Rasyad, 2020). Untuk menilai apakah suatu pemerintahan daerah dapat mengelola akun belanja modalnya secara baik atau tidak, salah satunya dengan rasio pencapaian BM. Rasio pencapaian BM dapat dihitung dengan membandingkan antara anggaran BM dengan realisasi BM. Semakin tinggi rasio pencapaian BM atau semakin rendah nilai selisih antara anggaran BM dengan realisasi BM, mengartikan bahawa Pemda mampu menyerap anggaran belanja secara optimal. Daya serap anggaran belanja yang optimal menghasilkan tingkat efisiensi tinggi yang dimiliki Pemda. Berdasarkan uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa aspek keuangan yang memiliki 2 komponen yakni PAD dan BM dapat menjadi tolak ukur untuk menilai baik atau tidaknya suatu tatakelola di pemeritahan, serta hasil dari tatakelola pemerintah itu sendiri tercermin dalam opini audit.

Yang kedua aspek non keuangan (SDM), kualitas SDM mencerminkan tingkat kemampuan seseorang di dalam organisasi untuk melakukan dan bertanggungjawab atas *jobdesk* yang telah diberikan kepadanya (Husna, 2008). Terdapat banyak sekali komponen untuk menilai kualitas SDM di pemerintahan daerah. Tiga diantaranya adalah politik dinasti, latar belakang politik, dan latar belakang pendidikan. Yang pertama adalah komponen politik dinasti, politik dinasti merupakan usaha seseorang di dalam pemerintahan untuk memberikan posisi atau jabatan strategis di dalam organisasi kepada sanak saudaranya, yang bertujuan untuk membuat kerajaan politik di dalam pemerintahan pusat maupun daerah (Agustino, 2014). Berdasarkan fakta serta bukti yang ada, praktik politik dinasti ini memberikan dampak yang negatif terhadap tata kelola pemerintahan serta praktik politik dinasti ini merupakan sebuah bentuk awal dari penyelewengan atas kekuasaan di dalam organisasi (Darmansyah *et al.* 2020). Berdasarkan *research* yang dilakukan oleh Sujarwoto (2015), didapat sebuah

kesimpulkan bahwa politik dinasti memiliki hubungan yang positif serta signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa semakin kecil nilai politik dinasti, maka kualitas SDM pun akan semakin tinggi. Lalu komponen kedua ada latar belakang partai politik, sebagian besar partai politik di Indonesia didirikan untuk kepentingan politik partai dan para anggotanya sendiri, serta mengesampingkan kepentingan serta aspirasi masyarakat. Berdasarkan *research* yang dilakukan oleh Bagus & Sari (2019) menyatakan bahwa dewan perwakilan daerah (DPD) yang memiliki latar belakang politik yang berasal dari parpol, sebagian besar dari DPD tersebut cenderung lebih mementingkan kepentingan partai politiknya dibandingkan dengan kepentingan pemerintahan atau masyarakat di daerahnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintahan yang berlatar belakang dari parpol mempunyai benturan kepentingan antara kebutuhan parpol dengan kebutuhan pemerintahan atau masyarakat. Sedangkan benturan kepentingan tinggi, yang dimiliki oleh kepala pemerintahan daerah maka akan mengakibatkan kualitas SDM yang rendah. Lalu komponen yang ketiga adalah latar belakang pendidikan. Untuk mengukur kualitas SDM yang dimiliki oleh organisasi, salah satunya dapat ditinjau dari komponen rata-rata latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh SDM di dalam organisasi tersebut (Griffin, 2004). Jika seorang kepala daerah yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, maka akan semakin tinggi pula kompetensi orang tersebut. Tingkat kompetensi yang tinggi yang dimiliki oleh seseorang akan menghasilkan kualitas SDM yang tinggi pula (Widagdo, 2017). Berdasarkan *research* yang dilakukan oleh Azlan *et al.* (2015) menjelaskan bahwa Pemda Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2015 memiliki opini atas laporan keuangan adalah WDP dan salah satu faktor yang menyebabkan Pemda tersebut memiliki opini WDP adalah rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh SDM di pemerintahan daerah tersebut. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa, semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki kepala daerah maka akan meningkatkan kualitas SDM di pemerintahan daerah tersebut. Dengan demikian kualitas SDM yang dimiliki Pemda dapat menjadi salah satu faktor dalam pemberian opini audit.

Penelitian ini sangat penting di lakukan karena pada masa sekarang belum ada penelitian yang ruang lingkupnya adalah aspek keuangan (PAD dan belanja modal) dan non keuangan (politik dinasti, latar belakang politisi dan latar belakang pendidikan) kepala daerah serta menghubungkannya dengan opini audit terutama pada sektor pemerintahan (publik). Keterbatasan pada penelitian ini merujuk hanya pada aspek keuangan berupa anggaran dan realisasi PAD dan modal belanja, lalu aspek non keuangan hanya pada politik dinasti, latar

belakang politik dan latar belakang pendidikan kepala daerah pada tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis apakah aspek keuangan (PAD serta belanja modal) dan non keuangan (politik dinasti, latar belakang politik dan latar belakang pendidikan) kepala daerah mempengaruhi opini audit. Sehingga resiko atas laporan keuangan tidak berkualitas dapat di minimalisir. Oleh karena itu, berdasarkan penjabaran diatas penting untuk dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Aspek Keuangan dan Non Keuangan terhadap Opini Audit pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Republik Indonesia”.

Kajian Literatur dan Pengembangan Hipotesis

Signaling Theory merupakan *grand* teori pertama yang digunakan dalam penelitian ini. Pemerintah memiliki kewajiban dalam memberikan signal kepada masyarakat dengan cara memberikan informasi keuangan yang akuntabel serta transparan, merupakan implementasi teori signaling dalam lingkungan pemerintahan daerah. Dalam teori signal ini mengartikan bahwa Pemda sebagai pengelola haruslah memberikan sinyal kepada masyarakat untuk menunjukkan kinerjanya dengan cara memberikan laporan atas pengelolaan keuangannya secara berkualitas seperti meningkatkan kualitas internal kontrol, memberikan laporan keuangan yang lebih lengkap, serta penjabaran yang lebih terperinci mengenai laporan keuangan tersebut (Hendriyani & Tahar, 2015). Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat serta sebagai bentuk promosi untuk tujuan politik, Pemda harus menginformasikan laporan keuangan yang berkualitas kepada masyarakat (Evans & Patton, 1987). Untuk membantu menyelesaikan kesalahpahaman antara pemerintah dengan masyarakat, teori *signaling* merupakan salah satu metode yang tepat untuk mengatasi *problem* tersebut (Puspita & Martani, 2011). Dengan memberikan informasi keuangan yang berkualitas kepada masyarakat, diharapkan akan memberikan kepercayaan yang lebih kepada Pemda mengenai bagaimana kualitas dari kinerja yang dimiliki oleh Pemda tersebut (Yuni & Vita, 2022).

Fraud Pentagon Theory adalah *grand* teori yang kedua dalam penelitian ini. Teori *fraud pentagon* muncul dari pengembangan teori *fraud triangle* oleh Cressey (1954) dan *fraud diamond* oleh Wolfe & Hermanson (2004). Teori *fraud pentagon* adalah salah satu teori yang dikemukakan oleh Crowe (2011). Teori *fraud pentagon* ini memiliki lima komponen: tekanan, peluang, rasionalisasi, kompetensi, dan arogansi. Teori *fraud pentagon* muncul karena dibangun di atas fenomena saat ini bahwa penipuan lebih umum dan sulit dideteksi karena kecukupan informasi yang dimiliki oleh para pelaku penipuan ini (Abdi & Williams, 2010).

Aspek Keuangan Untuk menilai kualitas pelaporan keuangan yang pertama adalah berdasarkan aspek keuangan. Berdasarkan hasil *research* yang dilakukan oleh Anita & Badrudin (2017), ketika BPK memberikan opini baik atas laporan keuangan Pemda, ini mengartikan bahwa Pemda tersebut memiliki kinerja keuangan yang baik pula. Hal ini menunjukkan bahwa opini audit dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh kinerja keuangan. Dari aspek keuangan, kita dapat melihat apakah Pemda dapat memberikan laporan keuangan yang berkualitas atau tidak. Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika terbebas dari salah saji material (*matreality*) dan terbebas dari kecurangan (*fraud*). Kualitas laporan keuangan yang baik salah satunya dapat kita tinjau berdasarkan akun Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal (BM).

Pendapatan Asli Daerah. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa PAD merupakan sebagai wujud desentralisasi Pemda diberikan otonomi atau kesempatan untuk mengelola seluruh kekayaan ekonomi yang dimiliki oleh daerahnya masing-masing, dengan catatan sesuai dengan hukum serta norma yang berlaku di Indonesia. Pengelolaan sumber daya asli daerah secara desentralisasi dapat kita tinjau dalam akun PAD yang dimiliki oleh Pemda. Akun PAD sendiri memiliki 4 komponen yang terdiri dari retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah.

PAD juga dapat digunakan sebagai parameter yang mengukur performa Pemda. PAD yang tinggi yang dimiliki oleh Pemda mencerminkan bahwa prestasi yang dicapai Pemda tersebut sudah baik, begitupun sebaliknya (Amelia & Anik Yuliati, 2021). Untuk melihat apakah Pemda telah menjalankan pemerintahannya secara efektif dan efisien dalam mengelola potensi daerah untuk dijadikan sebagai pendapatan secara otonomi yang digunakan oleh kesejahteraan masyarakatnya, dapat ditinjau melalui akun PAD yang dimiliki oleh pemerintahan daerah tersebut (Anggara & Cheisviyanny, 2020). Untuk komponen PAD, Pemda cenderung memiliki sikap tertutup dan membatasi akses informasi kepada masyarakat, karena komponen PAD memiliki memiliki tingkat material yang tinggi (Craven & Marston, 1999). Berdasarkan beberapa *research* terdahulu mengenai PAD, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara PAD dengan opini audit. Sehingga berdasarkan uraian diatas, dapat kita disimpulkan sebuah hipotesis:

H_1 : PAD berpengaruh positif terhadap opini audit.

Belanja Modal. Komponen kedua dari aspek keuangan adalah akun belanja modal. Belanja modal merupakan pengorbanan sumber daya baik secara *materil* yang dilakukan oleh Pemda guna mendapatkan aset tetap serta aset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari 1

periode akuntansi. Berdasarkan *research* yang dilakukan oleh Peni & Astawa (2021) menyebutkan bahwa, kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh variabel BM. BM yang tinggi yang dimiliki Pemda merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak sarana serta infrastruktur yang dibangun oleh Pemda maka akan mendukung peningkatan pertumbuhan kinerja Pemda tersebut, lalu semakin tinggi kualitas kinerja yang dimiliki oleh Pemda maka semakin tinggi pula tingkat perekonomian masyarakat di daerah tersebut, karena perekonomian masyarakat ditunjang dengan infrastruktur serta sarana yang memadai untuk mobilitas kegiatan perekonomian (Lestari & Hapsari, 2020). Sehingga berdasarkan beberapa penelitian terdahulu mengenai BM, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara BM dengan opini audit. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dapat kita disimpulkan sebuah hipotesis:

H₂: Belanja modal berpengaruh positif terhadap opini audit.

Aspek Non Keuangan Untuk menilai kualitas pelaporan keuangan yang kedua adalah berdasarkan aspek non keuangan. Dari aspek non keuangan kita dapat menilai bagaimana kualitas SDM yang dimiliki oleh pemerintahan daerah. Berdasarkan hasil *research* yang dilakukan oleh Bimantara (2007) menyebutkan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh variabel kualitas SDM. Banyak sekali komponen yang dapat dijadikan parameter untuk mengukur kualitas SDM yang dimiliki oleh suatu organisasi, tiga diantaranya adalah politik dinasti, latar belakang lingkungan politik dan latar belakang pendidikan.

Politik Dinasti. Komponen yang pertama dalam aspek non keuangan (SDM) adalah politik dinasti. Politik dinasti suatu keadaan dimana ketika seseorang yang memiliki jabatan atau kekuasaan didalam suatu organisasi melakukan usaha untuk memberikan jabatan atau kekuasaan di dalam organisasi tersebut kepada orang lain yang ternyata masih keluarganya sendiri. Ketika sebuah negara masih memiliki pendidikan serta perkembangan politik yang masih rendah, lalu tingkat pendidikan serta SDM yang dimiliki orgnasisasi masih terbilang cukup rendah, serta penegakan atas hukum yang berlaku masih rendah, maka sistem politik dinasti ini akan memberikan dampak yang negatif terhadap kinerja dari pemerintahan di negara tersebut (Bimantara, 2008). Fenomena dinasti politik ini hingga masa kini masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Berdasarkan pandangan umum dari masyarakat, mereka menilai bahwa dinasti politik sangat berpotensi memicu penyalahgunaan atas kekuasaan di pemerintahan. Tetapi pandangan lain menyebutkan

bahwa pelarangan atas praktik dinasti politik ini merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia, karena bagi pihak-pihak tertentu apalagi yang memiliki keluarga pada jabatan pemerintahan dilarang untuk mencalonkan diri dalam pilkada. Sehingga dampak dari sistem politik dinasti ini masih di perdebatkan hingga sekarang, karena terdapat perbedaan sudut pandang serta persepsi yang dimiliki setiap orang mengenai dampak dari politik dinasti ini. (Querubin, 2016) menyebutkan bahwa praktik politik dinasti ini sangat rawan akan penyelewengan etika politik. Banyak sekali pendapat yang menyatakan bahwa praktik politik dinasti ini berpotensi untuk mengembangkan praktik korupsi di dalam pemerintahan. Keberadaan praktik politik dinasti akan mempengaruhi bagaimana sistem pengendalian internal Pemda, ketaatan pada hukum yang berlaku dan kualitas pelaporan keuangan yang dimiliki Pemda (Tadem & Tadem, 2016). Maka dari itu opini audit akan dipengaruhi oleh variabel politik dinasti. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara politik dinasti dengan opini audit. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dapat kita disimpulkan sebuah hipotesis.

H₃: Politik dinasti berpengaruh negatif terhadap opini audit.

Latar Belakang Politik. Komponen kedua dalam aspek non keuangan (SDM) adalah latar belakang politik. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan bahwa jika seseorang ingin mencalonkan diri pada Pilkada untuk menjadi kepala daerah serta wakil kepala daerah, calon tersebut diusung oleh partai politik yang resmi serta legal di Indoneisa atau melalui jalur perseorangan (independen). Salah satu factor yang dominan dalam kemajuan perpolitikan serta dekmokrasi di Indoneisa adalah afiliasi partai politik. Meski demikian, para pemimpin daerah yang telah lama menjabat memahami celah dalam sistem yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi mereka sendiri (Prasetyo, 2014). Koordinasi partai politik mencari kekuasaan hanya dengan menghilangkan aspek-aspek ideal kandidat, dan pemilihan kandidat biasanya didasarkan pada loyalitas partai, status keuangan, dan kedekatan dengan sekelompok elit (Gunawan *et al.* 2017). Berdasarkan *research* yang dilakukan oleh Yusup & Aryani (2015) menyebutkan bahwa indikasi korupsi BM di pengaruhi secara postif dan signifikan oleh variabel afiliasi partai politik kepala pemerintah daerah. Seorang pemimpin yang memiliki sifat pribadi tidak bisa berbenah diri untuk melakukan penyimpangan adalah penyebab terjadinya tindakan korupsi (Nas *et al.* 1986). Tindakan korupsi yang dilakukan kepala daerah dapat disebabkan karena adanya kewajiban kepala daerah untuk membiayai partai politik pengusungnya (Tanzi, 1998). Sehingga berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu mengenai latar belakang politik di lingkungan pemerintahan, hal tersebut

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara latar belakang politik dengan opini audit. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dapat kita disimpulkan sebuah hipotesis:

H₄: Partai politik berpengaruh negatif terhadap opini audit.

Latar Belakang Pendidikan. Komponen ketiga dari aspek non keuangan (SDM) adalah latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan adalah keahlian yang dimiliki seseorang sebagai hasil pendidikannya untuk menyampaikan pemahaman tentang apa yang ingin disampaikan (Hendro & Purwaningsih, 2019). Jenjang pendidikan yang dimiliki oleh kepala pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indoneisa adalah jenjang SMA sampai dengan Doktoral. Salah satu elemen kunci dalam penyediaan kualitas laporan keuangan pemerintah adalah kualitas SDM yang dimiliki pemerintahan, dimana kualitas SDM tersebut dapat diperoleh dari tingkat pendidikan yang dicapainya (Wulan *et al.* 2020). Berdasarkan *research* yang dilakukan oleh Erniza *et al.* (2015) mendapatkan sebuah kesimpulan yang menyatakan bahwa latar belakang pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap opini audit. Hipotesis ini sejalan dengan *research* yang dilakukan oleh Saragih (2021) yang menyatakan bahwa kinerja dipengaruhi oleh latar pendidikan secara positif. Sehingga dari beberapa penelitian terdahulu mengenai latar belakang pendidikan untuk menunjang kualitas SDM menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara latar belakang pendidikan seorang pemimpin dengan opini audit. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dapat kita disimpulkan sebuah hipotesis sebagai berikut:

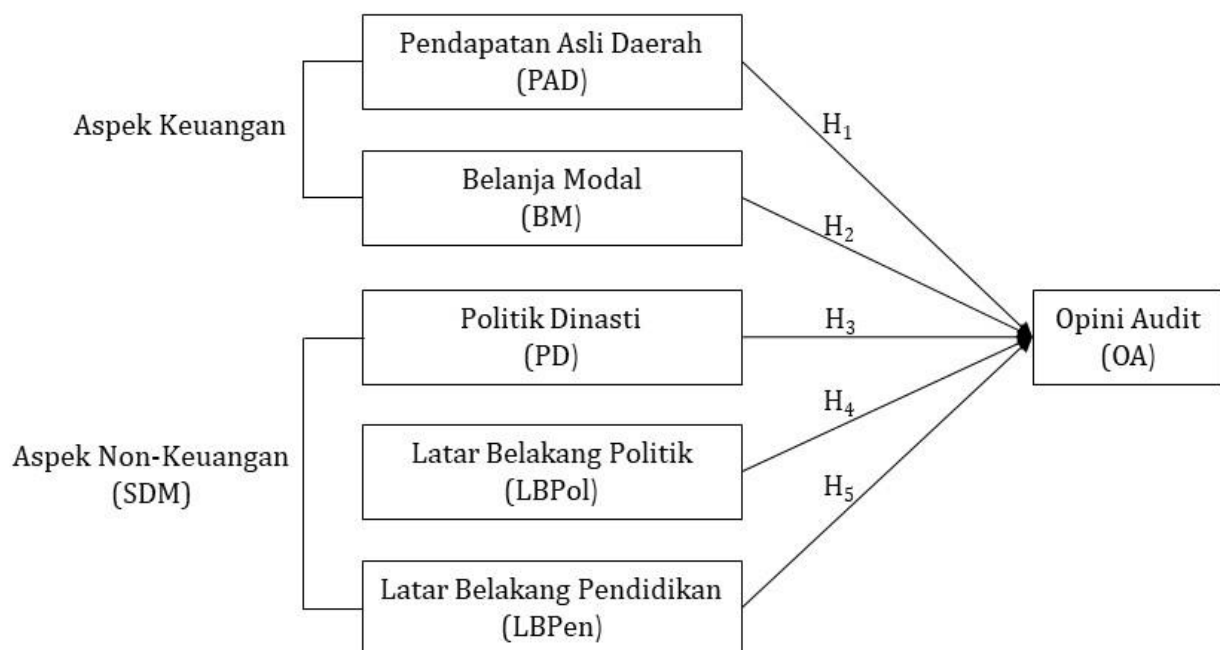
H₅: Latar belakang pendidikan berpengaruh positif terhadap opini audit.

Opini Audit Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 jenis Opini Audit yang diberikan oleh BPK RI atas Audit Laporan Keuangan Pemerintah terdiri atas empat kategori. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*: Mengartikan bahwa laporan keuangan suatu pemerintahan disajikan dengan wajar dalam semua hal yang material serta segala pengukuran dan perhitungan akuntansi sesuai dengan standar serta hukum yang berlaku di Indonesia. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*: Mengartikan bahwa laporan keuangan milik pemerintahan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material serta segala pengukuran dan perhitungan akuntansi sesuai dengan standar serta hukum yang berlaku di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*: Mengartikan bahwa laporan keuangan milik pemerintahan disajikan secara tidak wajar dalam semua hal yang material serta segala pengukuran dan perhitungan akuntansi tidak sesuai dengan standar serta hukum yang berlaku di Indonesia. Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of*

Yuni Iswari, R Nelly Nur Apandi, Agus Widarsono

opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): Mengartikan bahwa auditor tidak memiliki cukup bukti untuk dijadikan sebagai dasar dalam pemberian opini, situasi ini bisa saja terjadi karena auditor diberikan pembatasan akses untuk mengumpulkan bukti audit. Laporan hasil pemeriksaan BPK merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemda yang dapat dinilai oleh publik, dan semakin baik laporan hasil pemeriksaan maka semakin baik pula kinerja Pemda tersebut (Mardya & Kurniasih, 2017).

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa PAD, BM, politik dinasti, latar belakang politik dan latar belakang pendidikan mempengaruhi opini audit. Gambar 2 memetakan kerangka penelitian ini.



Gambar 2. Kerangka Konseptual Penelitian

Metode Penelitian

Objek dari penelitian ini dari aspek keuangan adalah variabel PAD dan variabel belanja modal, lalu dari aspek non keuangan (SDM) adalah variabel politik dinasti, variabel latar belakang politik, dan variabel latar belakang pendidikan. Subjek dari penelitian ini adalah data sekunder berupa data laporan keuangan untuk periode 2019 serta biodata kepala Pemda. Untuk data keuangan diperoleh dari BPK RI sedangkan untuk biodata diperoleh dari laman Wikipedia. Jenis data dalam penelitian ini adalah *cross section*. Populasi penelitian adalah Pemda Kabupaten dan Kota (Pemda) di Negara Indonesia sebanyak 507 Pemda. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive* dengan kriteria yaitu Pemda memiliki pencapaian anggaran PAD dengan rentang 50%-150% dan pencapaian BM dengan rentang 50%-100%. Maka didapat jumlah sampel sebanyak 200 sampel. Selanjutnya, data di

analisis secara deskriptif dan asosiatif. Pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah uji statistik deskriptif, uji keabsahan data, serta analisis data.

Uji statistik deskriptif dilakukan guna mengetahui gambaran data secara umum. Seperti nilai rata-rata (*mean*), modus (nilai yang sering muncul), tertinggi (maksimum), terendah (minimum), dan standar deviasi dari masing-masing variabel yaitu pendapatan asli daerah (PAD), belanja modal (BM), politik dinasti (PD), latar belakang politik (LBPol), latar belakang pendidikan (LBPen) dan opini audit (OA).

Sementara itu, uji keabsahan data meliputi uji normalitas, dan multikolinearitas. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan analisis grafik histogram dan *normal profitability plots* dan uji heterokedastisitas uji *White*, dengan ketentuan jika *chi square* hitung lebih kecil dari *chi square* tabel maka tidak terjadi gejala heterokedastisitas dan sebaliknya. Sedang uji multikolinearitas menggunakan nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Influence Factor*), dengan dasar ketentuan akan terjadi multikolinearitas jika nilai toleransi lebih kecil dari 0.10.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengevaluasi besaran pengaruh variabel independen (PAD, BM, PD, LBPol, LBPen) terhadap variabel dependen (OA). Persamaan 1 menampilkan persamaan regresi yang dikembangkan dalam penelitian.

$$OA = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 BM + \beta_3 PD + \beta_4 LBPol + \beta_5 LBPen + e$$

dimana:

OA = variabel opini audit, yang ukur secara *dummy* yaitu jika Pemda memiliki opini audit untuk laporan keuangan pada tahun 2019 WTP maka diberi nilai 0, dan jika Pemda memiliki opini selain dari WTP diberi nilai 1

PAD = variabel PAD yang dihitung dalam bentuk rasio dengan rumus
Rasio Pencapaian PAD = $\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}}$

BM = variabel belanja modal yang dihitung dalam bentuk rasio dengan rumus
Rasio Pencapaian Belanja Modal = $\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Anggaran Belanja Modal}}$

PD = variabel politik dinasti, jika kepala Pemda untuk masa jabatan tahun 2019 memiliki latar belakang politik dinasti maka diberi nilai 0, lalu jika kepala Pemda tidak memiliki latar belakang politik dinasti maka diberi nilai 1

LBP_{Pol} = variabel latar belakang politik, jika kepala Pemda untuk masa jabatan tahun 2019 memiliki latar belakang politik dari partai politik maka diberi nilai 0, lalu jika kepala latar belakang politiknya independen maka diberi nilai 1

LBP_{Pen} = variabel latar belakang pendidikan, jika kepala Pemda memiliki latar belakang belakang pendidikan SMA-S1 diberi angka 0, jika S2-S3 diberi nilai 1

Agar menghasilkan model yang baik, penelitian menggunakan sejumlah uji asumsi klasik (Wiratama, 2014;181). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan uji determinasi dengan melihat nilai R², yaitu semakin tinggi nilai R², semakin baik persamaan regresi yang dihasilkan untuk mengestimasi variabel dependen. Sedang uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 akan ditolak dan H_a akan diterima dan sebaliknya.

Hasil dan Pembahasan

Uji statistik deskriptif dilakukan guna mengetahui gambaran data secara umum. Seperti nilai min, max, mean, modus dan standar deviasi dari masing masing variabel yaitu PAD, BM, PD, LBP_{Pol}, LBP_{Pen} dan OA. Tabel 1 menampilkan hasil uji statistik deskriptif.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mena	Modus	Std. Dev	Minimum	Maksimum
PAD	200	0.968		0.196	0.50	1.50
BM	200	0.857		0.092	0.51	0.99
PD	200		1	0.412	0	1
LBP _{Pol}	200		0	0.428	0	1
LBP _{Pen}	200		1	0.501	0	1
Opini Audit	200		0	0.437	0	1

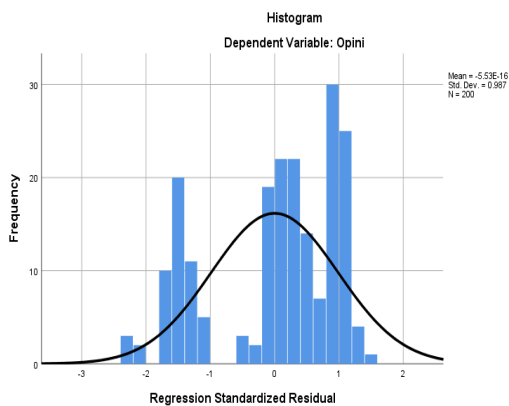
Keterangan: PAD=pendapatan asli daerah; BM=belanja modal; PD=politik dinasti; LBP_{Pol}= latar belakang politik; LBP_{Pen}=latar belakang pendidikan

Sumber: Data Diolah (2022)

Pada Tabel 1 simbol N mengartikan jumlah sampel, dalam penelitian ini terdapat 200 sampel penelitian berupa data keuangan dan non keuangan dari pemerintahan daerah kabupaten dan kota di Indonesia. Selanjutnya nilai minimum, nilai minimum dari variabel PAD sebesar 0.50 yang mengindikasikan jumlah terkecil dari nilai pencapaian anggaran pendapatan asli daerah sebesar 50%, lalu nilai minimum variabel BM sebesar 0.51 yang mengindikasikan jumlah terkecil dari nilai pencapaian belanja modalsebesar 51%, lalu untuk

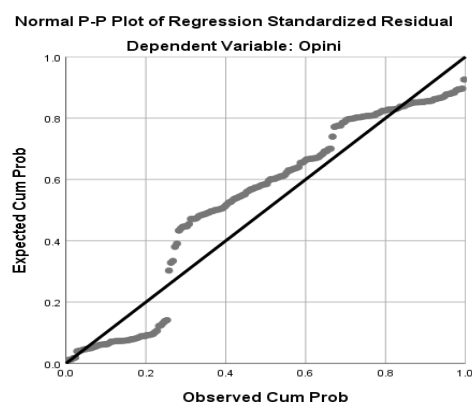
variabel PD, LBPol, LBPen dan OA nilai minimumnya adalah 0. Sebaliknya, untuk nilai tertinggi dari variabel PAD adalah 1.50 yang mengindikasikan jumlah terbesar pencapaian anggaran pendapatan asli daerah sebesar 150%, lalu nilai tertinggi untuk variabel BM sebesar 0.99, yang mengindikasikan nilai tertinggi dari pencapaian belanja modal sebesar 99%, lalu untuk nilai tertinggi untuk variabel PD, LBPol, LBPen dan OA adalah 1. Lalu untuk nilai *mean* (rata-rata) dari variabel PAD dan BM adalah 0.95 dan 0.85. Lalu untuk nilai modus untuk variabel PD, LBPol, LBPen dan OA adalah 1, 0, 1, 0 yang mengartikan bahwa indikator yang sering muncul dari variabel PD adalah non politik dinasti, LBPol adalah parpol, LBPen adalah S2-S3, dan OA adalah opini audit WTP. Lalu selanjutnya, berdasarkan uji statistik deskriptif terlihat bahwa nilai *mean* dari variabel PAD dan BM adalah 0.9569 dan 0.8554 lebih tinggi dibandingkan nilai standar deviasi variabel PAD dan BM yakni sebesar 0.1774 dan 0.0924, nilai *mean* yang tinggi dibandingkan dengan nilai *standar deviasi* mengartikan bahwa data yang diuji tersebut memiliki sebaran serta fluktuasi yang tinggi nilainya.

Penelitian ini menggunakan uji keabsahan data berupa uji normalitas berupa grafik histogram (Gambar 3) dan *normal profitability plots* (Gambar 4).



Gambar 3. Grafik Histogram

Sumber: Data Diolah (2022)



Gambar 4. Normal Profitability Plots

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan kedua gambar tersebut dapat dilihat bahwa data memiliki pola yang mengikuti arah garis grafik histogramnya dan pola distribusi normal telah terdistribusi normal yang dibuktikan dengan keberadaan titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis tersebut. Hasil ini mengindikasikan bahwa kedua gambar memberikan pola distribusi yang mendekati normal.

Sementara itu, uji heterokedastistas dilakukan dengan menggunakan uji *White* dan hasilnya menunjukkan bahwa *chi square* hitung sebesar 59.2 ($0.296[R^2] * 200[\text{sampel}]$) dan nilai *chi square* tabel 233.99. Dengan demikian, *chi square* hitung lebih kecil dari *chi square* tabel dan

ini dimaknai sebagai data penelitian yang digunakan dalam penelitian terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya, penelitian juga melakukan uji multikolinearitas dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF yang hasilnya ditampilkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Uji Heterokedastisitas

Variabel	Tolerance	VIF
PAD	0.967	1.035
BM	0.953	1.049
PD	0.954	1.048
LBPoI	0.944	1.059
LBPen	0.961	1.041

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 2 dapat kita lihat bahwa nilai *tolerance* untuk setiap variabel independen PAD, BM, PD, LBPoI dan LBPen memiliki nilai *tolerance* < 0.10 dan nilai VIF < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya gejala multikolinearitas.

Tabel 3 menampilkan hasil uji regresi linier berganda. Berdasarkan hasil uji tersebut diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$OA = 0.886 - 0.219PAD + 0.246BM - 0.254PD + 0.388LBPoI - 0.066LBPen$$

Dapat dilihat bahwa variabel independen yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen dalam penelitian ini adalah variabel latar belakang politik (LBPoI) dengan nilai 0.388. Selanjutnya, nilai konstanta yang diperoleh dari uji regresi linier berganda dalam penelitian ini sebesar 0.886. Hal ini mengindikasikan, jika variabel PAD, BM, politik dinasti, latar belakang politik dan latar belakang pendidikan = 0, maka nilai opini audit sebesar 0.886. Tabel 3 juga menampilkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) yang sebesar 0.185. Hal ini mengartikan bahwa variabel independen PAD, BM, PD, LBPoI dan LBPen mempengaruhi variabel dependen (OA) sebesar 18.5%. Sedang sisanya yang sebesar 81.5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Lebih lanjut, Tabel 4 juga menunjukkan hasil uji t. Dapat kita lihat bahwa variabel independen politik dinasti (PD) dan latar belakang politik (LBPoI) memiliki nilai signifikansi 0.000. Jika nilai signifikansi $0.000 < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen politik dinasti (PD) dan latar belakang politik (LBPoI) mempengaruhi variabel dependen yakni opini audit. Selanjutnya, untuk variabel pendapatan asli daerah (PAD), belanja modal (BM) dan latar belakang pendidikan (LBPen)

memiliki nilai signifikansi >0.05 . Hal ini mengartikan bahwa variabel independen tersebut tidak mempengaruhi variabel dependen yakni opini audit.

Tabel 3. Hasil Regresi

Model	Koefisien	Std. Error	t	Sig.
Konstanta	0.886	0.295	3.001	0.003
PAD	-0.219	0.147	-1.494	0.137
BM	-0.246	0.314	0.786	0.433
PD	-0.254	0.070	-3.606	0.000
LBPOL	0.388	0.068	5.696	0.000
LBPEN	-0.066	0.058	-1.144	0.254

Keterangan: PAD=pendapatan asli daerah; BM=belanja modal; PD=politik dinasti; LBPOL=latar belakang politik; LBPEN=latar belakang pendidikan.

Sumber: Data Diolah (2022)

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Opini Audit H_1 menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap opini audit. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa nilai koefisien β_1 sebesar -0.219 dan nilai *p-value* sebesar $0.137 > 0.05$, maka H_1 ditolak dan PAD tidak berpengaruh terhadap opini audit. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Amelia *et al.* (2021) yang menyebutkan bahwa Pemda dengan PAD yang besar tidak memengaruhinya dalam mengungkapkan informasi keuangannya. Lalu berdasarkan *research* yang dilakukan oleh Nosihana & Yaya (2016) menyebutkan bahwa PAD yang tinggi tidak akan berpengaruh penyajian laporan keuangan. Besarnya PAD tidak berdampak secara langsung bagi masyarakat, sehingga Pemda yang memiliki PAD yang tinggi tidak selalu mencerminkan pengelolaan keuangan yang baik serta menjamin bahwa Pemda tersebut dipastikan memiliki opini atas laporan keuangan yang baik. Maka berdasarkan analisis yang dilakukan pencapaian anggaran PAD tidak mempengaruhi opini audit.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Opini Audit H_2 menyatakan bahwa BM berpengaruh positif terhadap opini audit. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa nilai koefisien β_2 sebesar 0.246 dan nilai *p-value* sebesar $0.433 > 0.05$, maka H_2 ditolak dan BM tidak berpengaruh terhadap opini audit. Hal ini mendukung *research* yang dilakukan oleh Adhariani (2014) yang menyebutkan bahwa kinerja keuangan pada pemerintah provinsi di Indonesia tidak dipengaruhi oleh tinggi atau rendahnya BM yang dimiliki oleh pemerintah provinsi tersebut. Hal ini dikarenakan BM yang dikeluarkan, terkadang tidak diperlukan oleh

masyarakat atau untuk pembangunan di provinsi tersebut. Lalu berdasarkan *research* yang dilakukan oleh Sudarsana & Raharjo (2013) menyebutkan bahwa bahwa BM tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemda. Maka dapat kita simpulkan bahwa BM yang tinggi tetapi tidak diiringi dengan perencanaan dan penyaluran anggaran belanja yang baik tidak akan berpengaruh bagi pengelolaan keuangan pemerintahan daerah. Berdasarkan analisis yang dilakukan pencapaian anggaran BM tidak mempengaruhi opini audit.

Pengaruh Politik Dinasti terhadap Opini Audit H_3 menyatakan bahwa politik dinasti berpengaruh negatif terhadap opini audit. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa nilai koefisien β_3 sebesar -0.254 dan nilai *p-value* sebesar $0.000 < 0.05$ maka H_3 diterima dan politik dinasti berpengaruh terhadap opini audit. Hal ini mendukung *research* yang dilakukan Tadem & Tadem (2016) yang menyebutkan keberadaan politik dinasti akan mempengaruhi bagaimana sistem pengendalian internal Pemda, ketaatan pada hukum yang berlaku dan kualitas pelaporan keuangan. Lalu berdasarkan *research* yang dilakukan Bimantara (2007) menyebutkan bahwa, dinasti politik dapat memiliki konotasi negatif ketika berbicara tentang dinasti politik yang ada di antara orang-orang dengan sedikit pendidikan politik, sistem hukum yang lemah, dan penegakan hukum dan institusi politik yang masih labil. Maka berdasarkan analisis yang dilakukan politik dinasti yang dilakukan oleh kepala pemerintahan daerah kabupaten dan kota berpengaruh terhadap opini audit.

Pengaruh Latar Belakang Politik terhadap Opini Audit H_4 menyatakan bahwa latar belakang politik berpengaruh negatif terhadap opini audit. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa nilai koefisien β_4 sebesar 0.388 dan nilai *p-value* sebesar $0.000 < 0.05$, maka H_4 diterima dan latar belakang politik berpengaruh terhadap opini audit. Hal ini mendukung *research* yang dilakukan oleh Dewi (2015) yang menjelaskan bahwa kinerja keuangan yang baik dipengaruhi oleh latar belakang politik yang dimiliki oleh anggota DPRD, maka dari itu latar belakang politik yang dimiliki oleh DPRD berpengaruh terhadap pengawasan keuangan pemerintahan daerah, serta dapat disimpulkan latar belakang politik yang baik yang dimiliki oleh anggota DPRD maka semakin baik pula efektifitas kinerjanya. Lalu *research* lain yang dilakukan oleh Wulandari (2015) yang menyebutkan bahwa kualitas pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD dipengaruhi oleh latar belakang politik serta pengalaman politik yang dimiliki oleh DPRD di daerah tersebut. Maka berdasarkan analisis yang dilakukan latar belakang politik yang dimiliki oleh kepala pemerintahan daerah kabupaten dan kota berpengaruh terhadap opini audit.

Pengaruh Latar Belakang Pendidikan terhadap Opini Audit H_5 menyatakan bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh positif terhadap opini audit. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa nilai koefisien β_5 sebesar -0.066 dan nilai *p-value* sebesar $0.254 > 0.05$, maka H_5 ditolak dan latar belakang pendidikan tidak berpengaruh terhadap opini audit. Hal ini mungkin saja terjadi ketika seseorang yang berlatar pendidikan tinggi, tetapi tidak sesuai dengan bidang kemampuannya sehingga pendidikan yang ia peroleh kurang bisa di optimalkan di dalam kepengurusan pemerintahan daerah. Lalu pendidikan formal tidak selalu menjamin seseorang mampu mengatasi sebuah masalah atau menciptakan keputusan yang tepat, terdapat faktor lain seperti pengalaman yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam membuat keputusan yang tepat. Maka berdasarkan analisis yang dilakukan latar belakang pendidikan formal tidak mempengaruhi opini audit.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, didapat sebuah kesimpulan bahwa politik dinasti (PD) dan latar belakang politik (LBP_{ol}) memiliki pengaruh terhadap opini audit (Y). Sedangkan, untuk variabel pendapatan asli daerah (PAD), belanja modal (BM) dan latar belakang pendidikan (LBP_{en}) tidak memiliki pengaruh terhadap opini audit (OA). Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah (1) penelitian ini hanya menggunakan sampel pemerintahan daerah kabupaten dan kota yang memiliki tingkat pencapaian anggaran PAD dengan interval 50%-150%. (2) penelitian ini hanya menggunakan sampel pemerintahan daerah kabupaten dan kota yang memiliki tingkat pencapaian anggaran BM dengan interval 50%-100%. (3) penelitian ini hanya menggunakan data keuangan dan non keuangan untuk periode tahun 2019 saja. (4) keterbatasan mengenai data tentang politik dinasti dan latar belakang politik yang dimiliki kepala pemerintahan kabupaten dan kota (5) terbatasnya waktu dalam melakukan penelitian. Maka untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel mengenai pengelolaan arus kas untuk aspek keuangan atau pengalaman kepala Pemda yang telah menjabat selama 2 periode jabatan, serta faktor lain yang dapat mempengaruhi opini audit. Selain itu diharapkan menambahkan sample atau bahkan menggunakan populasi untuk data penelitian, sehingga hasil dari penelitian diharapkan lebih tepat lagi.

Acknowledgement

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengakui segala *support* yang di berikan oleh program studi Magister Ilmu Akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia atas kesempatan serta dukungan yang diberikan kepada peneliti, serta untuk pihak *reviewer* dan *publisher* yang telah membantu artikel ini terbit.

Daftar Pustaka

- Abdi, H., & Williams, L. J. (2010). Principal component analysis. In *Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics* (Vol. 2, Issue 4, pp. 433–459).
<https://doi.org/10.1002/wics.101>
- Adhariani, R. S. (2014). *Opini Audit dan Pengungkapan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serta Kaitannya Dengan Korupsi di Indonesia* (Vol. 13, Issue 1).
- Agustino, L. (2014). Politik Lokal dan Otonomi Daerah. *Bandung: Alfabet*.
- Amelia, M. I., & Anik Yuliati. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit Terhadap Internet Financial Reporting Pemerintah Kota/Kabupaten Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMAT) Univeristas Ghanesa*, 12(3), 2614–1930.
- Anggara, E., & Charoline Cheisviyanny. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 2(1), 2162–2184.
- Anita, C. P. N., & Rudy Badrudin. (2017). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Opini Audit Dan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Anjelina, M. S. (2012). Aspek-Aspek Dalam Pemberian Opini Audit Going Concern (Vol. 5678478).
- Artya Rahma Putri, R., & Lailatul Amanah, D. (2020). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*.
- Astutin, S. (2008). Peran Teknologi Komputer Terhadap Profesi Akuntan Dalam Sistem Informasi Akuntansi di Era Globalisasi. *Jurnal Akuntansi FE Unsil*, 3(2), 488–493.
- Azlan, M., Herwanti, T., & Pituringsih, E. (2015). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi, dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Daerah Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. In *Jurnal Akuntansi Aktual* (Vol. 3).

- Bagus, M., & Helga Nurmila Sari. (2019). Urgensi Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Yang Bebas dari Anggota Partai Politik. *Institut Agama Islam Negri (IAIN) Kendari*, 12(2), 307–319.
- Benny, P. M. (2016). Peran Humas Badan Pusat Statistik Sebagai Pengelola Manajemen Reputasi di Era Keterbukaan Informasi Publik.
- Bimantara, N. (2007). Analisis Politik Dinasti di Kabupaten Kediri. https://www.researchgate.net/profile/Novy_Yunas/
- Cahya, K., & Wibawa, S. (2019). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. In *Online Administrative Law & Governance Journal* (Vol. 2, Issue 2).
- Craven, B. M., & Marston, C. L. (1999). Financial reporting on the internet by leading UK companies. *The European Accounting Review*, 8(2), 321–333.
- Crowe, H. (2011). Why The Fraud Triangle Is No Longer Enough. In *Horwath, Crowe LLP*.
- Darmansyah, R., Siti Desma Syahrini, & Zulfa Harirah MS. (2020). Potret Dinasti Politik Dalam Pengisian Jabatan Administratif. *Jurnal Of Political Issues*, 2(1), 34–46.
- Dewi. (2015). Pengaruh Kompetensi dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Keuangan Daerah pada Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Lawang Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*.
- Emilda, I. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupten Lima Puluh Kota. *Skripsi. Universitas Negri Padang*.
- Erniza, D., Zaitul, & Yunilma. (2015). Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Kepala Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Opini Audit Terhadap Audit Report Lag (Pada Pemerintah Daerah Kepulauan Sumatera). <https://www.researchgate.net/publication/343472231>
- Evans, J., & Patton, J. (1987). Signalling and Monitoring in Public Sector *Accounting Journal of Accounting Research*.
- Faturohman, D. (2017). Esensi Keterbukaan Informasi Publik Bagi Warga Negara Indonesia Pada Era Reformasi. *Jurnal Adminstrasi, Manajemen Dan Kependidikan*, 4.
- Fitria, V. S. (2015). Analisis Perbandingan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dan Wajar Dengan Pengecualian. *Jurnal Praktik Bisnis*, 4(1), 2302–9242.
- Griffin, R. W. (2004). Manajemen. *Jakarta: Erlangga*.

- Gumelar, A. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi pada SKPD di Kabupaten Kerinci). *Skripsi. Universitas Negeri Padang*.
- Gunawan, S. D., Ismi, D. A. N., Mantrini, I. H., & Lungid, W. (2017). *Pilkada, Politik Dinasti, Dan Korupsi*.
- Halim, A. (2001). Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah. *Salemba Empat*.
<https://doi.org/10.35326/jiam.v3i1>
- Halim, A. (2012). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ke Empat. *Salemba Empat*. <https://doi.org/10.35326/jiam.v3i1>
- Hendriyani, R., & Afrizal Tahar. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia. In *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* (Vol. 22, Issue 1).
- Hendro, W. H., & Endang Purwaningsih. (2019). Pengaruh Nilai APBD, Total Asset, Opini Audit, Dan Latar Belakang Pendidikan Terhadap Audit Delay Pemerintah Daerah Di Subosukowonosraten. *Media Akuntansi*, 93(1), 11–20.
- Hidayah, N., & Ghazalah, K. (2020). Analisis Ketercapaian Dan Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 3(1), 2684–9283. <https://doi.org/10.35326/jiam.v3i1>
- Hini, M. (2019). Analisa Dampak Globalisasi Terhadap Perdagangan Internasional. In *Jurnal Ekonomia* (Vol. 9, Issue 1).
- Husna, F. (2008). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Terhadap Nilai Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kota Padang Panjang). *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Standar Audit Seksi 316 Pertimbangan Atas Kecurangan Dalam Audit Laporan Keuangan.
- Lestari, E., & Dini Wahjoe Hapsari. (2020). Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2013-2018).
- Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. *Yogyakarta*.
<https://doi.org/10.24252/kah.v7i1a2>

- Mardiyati, M., & Wahyudi, H. (2018). Penerapan Prinsip GCG (Transparansi & Akuntabilitas) Dalam Kerangka Laporan Keuangan Kelompok Pemodal 13 Di Pontianak Timur. *JES (Jurnal Ekonomi STIEP)*, 3(2), 24–30. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i2.2692>
- Mardya, P. K., & Lulus Kurniasih. (2017). Pengaruh Opini Audit Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia. In *51 EQUITY* (Vol. 20, Issue 1).
- Marfiana & Kurniasih. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 3(1). <https://doi.org/10.31289/jab.v5i2.2692>
- Mulyani, P., & Rindah F. Suryawat. (2011). Analisis Peran dan Fungsi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP/PP No. 60 Tahun 2008) Dalam Meminimalisi Tingkat Salah Saji Pencatatan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 7(2), 102–116.
- Mustajib, & Aditya, P. (2022). Konflik Kepentingan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Kota Tarakan Pasca Pemekaran Daerah: Studi Tentang Konflik Aset Pelabuhan Tenggayu I dan Tenggayu II. *VOX POPULI*, 5, 34–52.
- Nas, T. F., A. C. Price, & C. T. Weber. (1986). *A Policy-Oriented Theory of Corruption*. www.ti.or.
- Nosihana, A., & Yaya, R. (2016). Internet Financial Reporting Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota Dan Kabupaten di Indonesia. *Urnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 89–104.
- Peni, S. K., & Gede Putu Banu Astawa. (2021). Pengaruh Opini Audit, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2015-2019. In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha* (Vol. 12, Issue 03).
- Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006.
- Prasetyo, A. (2014). Karakteristik Kepala Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia. www.ti.or.
- Pratiwi, T. Y. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan

- Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016. In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha* (Vol. 12, Issue 03).
- Priyanto, J. Agung. (2009). DPRD Penyumbang Opini WDP LKPD Pemprov Gorontalo TA 2008. *Majalah Dwinulanan BPK RI-ISSN-0216-8154No118/April 2009-Juni 2009/XXVII*.
- Puspita, R., & Martani. (2011). Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam Website Pemda.
- Querubin, P. (2016). Family and Politics: Dynastic Persistence in the Philippines (Vol. 11). *Quarterly Journal of Political Science*.
- Rachmattie, A., Ahmadi, D., Ema Khotimah, dan, & Khotimah, E. (2008). Dinamika Transparansi dan Budaya Badan Publik Pasca Reformasi Birokrasi (Studi Kasus Tentang Good Governance dan Clean Governance Badan Publik Se-Indonesia dalam Meningkatkan Kualitasnya Sebagai Badan Publik Perspektif UU Keterbukaan Informasi Publik No.14/2008 Di Propinsi Jabar dan Kalbar).
- Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1), 147–153.
<https://doi.org/10.30596/jrab.v19i1.4752>
- Rasyad, M. (2020). Pengaruh Belanja Rutin, Belanja Modal, Leverage dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemda (Studi Empiris Pada Pemda Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat). *Skripsi. Universitas Bung Hatta*.
- Rasyid, R. (2000). Peningkatan SDM Aparatur dan Tata Laksana serta Pelayanan Publik. *Institut Agama Islam Bengkulu*.
- Renas, & Dul Muid. (2014). Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2009-2011). *Dipenogoro Journal Accounting*, 4, 1.
- Rudyawan, A. P., & I. D. N. Badera. (2009). Opini Audit Going Concern: Kajian Berdasarkan Model Prediksi Kebangkrutan, Pertumbuhan Perusahaan, Leverage, dan Reputasi Auditor.
- Saragih, A. (2021). Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Lama Bekerja, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Judicious Journal of Management*, 2(1), 23–28.

- Sipayung, B., & Wahyudi, A. (2022). Penerapan Good Governance dalam Rangka Meningkatkan Kualitas. *Jurnal Pendidikan Tambusa*, 6(2), 12323–14334.
- Soleman, R. (2013). Pengaruh Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud.
- Sudarsana, H., & Raharjo, S. N. (2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(4), 1–13.
<https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.111-130>
- Sujarwoto. (2015). Desentralisasi, Dinasti Politik Dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 1(2), 1–6.
- Tadem, T. S. E., & Eduardo C Tadem. (2016). Political Dynasties in The Philippine: Persistent Patterns, Perennial Problems (Vol. 28). *South East Asia Research*.
- Tanzi, V. (1998). Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope, and Cures. www.ti.or.
- Tjiptoherijanto, P. (1997). Migrasi Urbanisasi dan Pasar Kerja di Indonesia.
<http://nts2007.blogspot.co.id/2013/08/deklarasi->
- Ubar, R. H., & Khairul, A. P. (2019). Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Profesionalisme terhadap Salah Saji Material pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 19(1), 2623–2650.
<https://doi.org/10.30596/jrab.v19i1.4752>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tnggung Jawab Keuangan Negara.
- Wells, J. T. (2007). *Corporate Fraud Handbook: Prevention and Detection (Second Edition)*.
- Widagdo, S. (2017). Konsepsi Teori Dan Implementasi Manajemen Sumberdaya Manusia. *STIE Mandala Jember*.

- Wulandari, B. I. (2015). Pengaruh E-Government, Kapabilitas APIP dan Persentasi Penyelesaian Tindak Lanjut Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 15(2), 148–157.
- Wulan, D. A., Yudi, & Rita Fitriyani. (2020). Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada OPD Di Pemerintah Kabupaten Muara Bungo). *Jambi Accounting Review (JAR)*, 1(1), 1–19.
- Yuni, & Vita, F. S. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan dalam Website Pemerintah Daerah: Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Indonesia. In *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)* (Vol. 4, Issue 3). Online. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/index>
- Yusup, M., & Y. Anni Aryani. (2015). Karakteristik Kepala Daerah, Afiliasi Partai Politik dan Indikasi Korupsi Belanja Modal. *www.ti.or*.